

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah sebagai proses multidimensional yang melibatkan lebih dari sekadar peningkatan pendapatan per kapita atau pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mencakup perubahan besar dalam struktur sosial, perilaku masyarakat, dan institusi nasional. Pembangunan ekonomi harus dilihat sebagai upaya untuk mencapai transformasi sosial yang lebih luas, di mana peningkatan ekonomi harus disertai dengan pengurangan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran. Proses ini juga melibatkan perbaikan dalam kualitas hidup, termasuk akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Dalam pandangan mereka, pembangunan ekonomi bukan hanya soal mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana hasil dari pertumbuhan tersebut didistribusikan secara adil, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, politik, dan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Todaro & Smith, 2020: 116).

Tabel 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Provinsi	PDRB
DKI Jakarta	2.151.041
Banten	531.735
Jawa Barat	1.752.071
Jawa Tengah	1.157.026
DI Yogyakarta	124.590
Jawa Timur	1.935.810

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Berdasarkan data badan pusat statistik menunjukan bahwa Provinsi Jawa Timur menduduki urutan kedua dengan nilai 1.935.810 miliar rupiah. Capaian ini menunjukkan kontribusi ekonomi dan kapasitas produksi Jawa Timur yang signifikan di tingkat nasional. Salah satu metrik utama untuk menilai kesehatan ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, baik dari segi harga saat ini maupun harga stabil, adalah PDRB. PDRB sangat memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja Indonesia (Tarman *et al.*, 2022).

Pembangunan ekonomi sangat terkait erat dengan sumber daya manusia (SDM), karena keberhasilan pembangunan ekonomi bergantung pada kualitas dan pengembangan SDM. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan SDM yang berkualitas, terampil, dan berpendidikan, yang mampu meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan

mendorong investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM. Dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan, yang semuanya memperkuat kualitas tenaga kerja. Selain itu, pembangunan ekonomi juga mendorong mobilitas sosial dan membuka kesempatan bagi SDM untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor baru, seperti teknologi dan industri kreatif, yang memerlukan keterampilan yang lebih tinggi dan memberikan upah yang lebih baik. Proses ini menciptakan siklus positif di mana peningkatan kualitas SDM mendukung pembangunan ekonomi yang lebih maju, dan pembangunan ekonomi yang kuat, pada gilirannya, semakin memajukan pengembangan SDM, menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Abdillah & Ramadhan, 2023: 56).

Pengembangan SDM yang tidak berjalan dengan maksimal memiliki dampak serius terhadap peningkatan pengangguran dan stagnasi ekonomi. Ketika SDM tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, pelatihan keterampilan yang relevan, atau akses ke layanan kesehatan yang baik, produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, dan daya saing individu di pasar kerja menurun. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak dapat memenuhi kualifikasi pekerjaan yang tersedia, sehingga meningkatkan angka pengangguran, terutama di kalangan anak muda dan pekerja dengan pendidikan rendah (Franita & Fuady, 2019: 88).

Safitri & Endang (2024: 545) menjelaskan bahwa pengangguran merupakan indikator dari penurunan aktivitas ekonomi. Penurunan ini dapat terlihat dari munculnya produk-produk baru yang lebih unggul, pesatnya perkembangan teknologi

yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja serta menurunnya permintaan terhadap produk. Selain itu, biaya produksi yang tinggi membuat perusahaan kurang kompetitif, sementara ekspor menurun karena harus bersaing dengan negara-negara lain. Kondisi ini terjadi akibat adanya perubahan dalam struktur ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran, di mana sebagian pekerja harus kehilangan pekerjaan mereka.

Ishak (2018: 24) berpendapat bahwa sejumlah alasan berkontribusi terhadap pengangguran, termasuk kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, pertumbuhan sektor ekonomi fiktif, pencapaian pendidikan yang rendah, dan kurangnya keterampilan. Lebih jauh, keterampilan pencari kerja tidak sesuai dengan permintaan pasar, dan jumlah posisi yang sedikit tidak sepadan dengan jumlah pencari kerja. Jumlah lulusan yang tidak bekerja meningkat setiap tahun karena banyak orang dengan pendidikan tinggi tidak dapat memperoleh pekerjaan karena masalah akses.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Pada bulan Februari 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur sebesar 3,74 persen, yang menunjukkan bahwa Penduduk yang tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki TPT terbesar, yaitu sebesar 6,42 persen, sesuai dengan jenjang pendidikan tertinggi yang ditempuh. Penduduk yang tamat Sekolah Dasar atau kurang memiliki tingkat pengangguran terendah (2,38 persen).

Tabel 1.2 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2024

Provinsi	Jumlah Angkatan Kerja
DKI Jakarta	5,44 juta orang
Banten	6,21 juta orang
Jawa Barat	26,19 juta orang
Jawa Tengah	21,91 juta orang
DI Yogyakarta	2,26 juta orang
Jawa Timur	24,38 juta orang

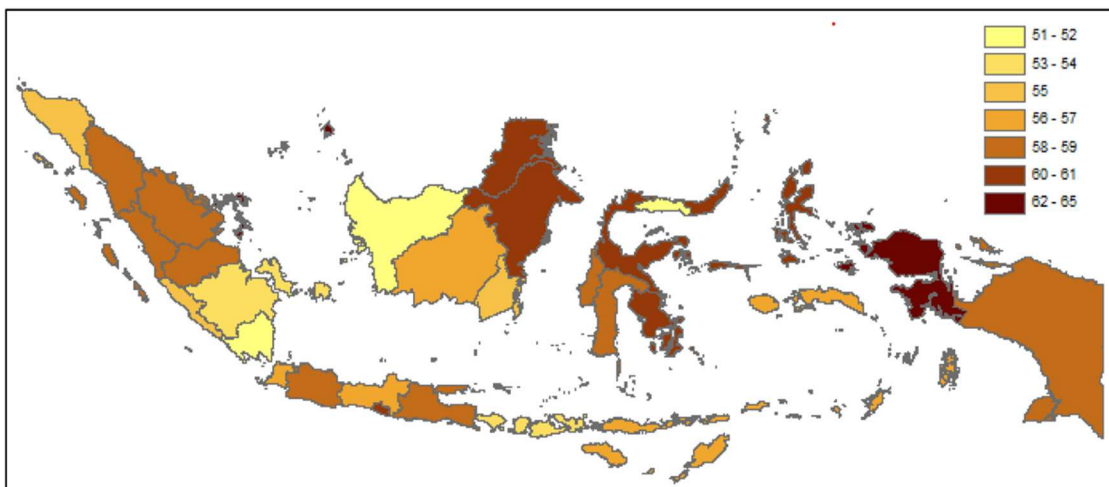
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah angkatan kerja menurut provinsi di pulau Jawa tahun 2024 Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua dengan jumlah angkatan kerja terbanyak di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh jumlah angkatan kerja yang cukup besar. Peningkatan tingkat output merupakan akibat langsung dari bertambahnya jumlah karyawan. Salah satu faktor pendorong perekonomian daerah adalah tenaga kerja, atau tenaga kerja yang bergerak pada sektor perekonomian. Guna mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan tingkat output (Leonard Krismanto Simeon *et al.*, 2022).

Besarnya angkatan kerja suatu negara dapat menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Akan ada peluang untuk mempercepat kemajuan perekonomian jika dapat memanfaatkannya. Di sisi lain, hal ini akan menjadi permasalahan dalam suatu negara jika tidak mampu memanfaatkannya. Hal ini akan menimbulkan pasar kerja tidak meningkat sebanyak jumlah pekerja. Kelebihan tenaga kerja disebabkan oleh kondisi tertentu (perekonomian surplus tenaga kerja). Selain itu, kualitas pasar kerja juga di bawah standar sehingga berkontribusi pada rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Kelebihan tenaga juga mengindikasikan bahwa adanya ketidaksesuaian

antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri (*mismatch* ketenagakerjaan) (Wijayanto & Ode, 2019).

Kesenjangan antara jumlah pekerja berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai dan permintaan pekerja di pasar tenaga kerja untuk jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan (keterampilan) tertentu disebut *mismatch* ketenagakerjaan. Ketidaksesuaian antara gelar seseorang dengan pekerjaan yang diperolehnya disebut dengan ketidaksesuaian dalam dunia kerja. Ketidaksesuaian bidang pendidikan atau keterampilan dapat dipahami sebagai beberapa jenis ketidakseimbangan antara kemampuan yang dibutuhkan di tempat kerja dengan bidang pendidikan atau keterampilan yang dapat diakses (Dilly & Papuling, 2021).



Gambar 1.1 Peta *Mismatch* Ketenagakerjaan Menurut Provinsi

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2 Provinsi Jawa Timur memiliki kondisi *mismatch* yang cukup tinggi jika dibandingkan provinsi yang ada di pulau Jawa. Tingkat ketidaksesuaian lapangan kerja yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Timur mencerminkan kesenjangan antara permintaan industri dan keterampilan yang dimiliki

tenaga kerja. Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Jawa Timur menghadapi tantangan besar dalam memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja yang dinamis dengan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Banyak lulusan pendidikan formal dan vokasi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya karena kompetensi yang dimilikinya belum sesuai dengan kebutuhan industri. Namun, dunia usaha kesulitan merekrut karyawan dengan keahlian khusus yang mereka inginkan, khususnya di sektor industri, teknologi, dan kreatif.

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen) 2020-2024

Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	2,78	3,15	3,81	2,24	2,89
SMP	5,66	6,46	6,97	4,87	4,1
SMA	9,34	8,85	8,46	7,93	4,64
SMK	11,89	9,54	6,7	8,7	6,42
Diploma	6,56	5,11	5,76	4,64	3,09
Universitas	6,08	5,17	3,49	5,04	4,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 1.2 tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Provinsi Jawa Timur menunjukkan pendidikan SMA dan SMK menyumbang persentase terbanyak terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan antara tahun 2020 dan 2024. Salah satu aspek pertumbuhan ekonomi

yang tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai adalah belum seimbang antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dari sisi penawaran, terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk usia kerja masih rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, sebagian penduduk usia sekolah juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja (BPS Jawa Timur, 2024).

Becker G (1984: 30) menjelaskan bahwa investasi dalam modal manusia, seperti pendidikan dan pelatihan, merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan yang lebih baik cenderung lebih produktif dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pasar kerja. Hal ini mengurangi risiko pengangguran, terutama pengangguran struktural, yang terjadi ketika keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Becker mencatat bahwa on the job training dapat meningkatkan kompetensi kerja, terutama bagi individu yang baru memasuki pasar kerja atau yang keterampilannya sudah ketinggalan zaman. Melalui on the job training, pekerja mendapatkan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja saat ini, yang meningkatkan peluang mereka untuk tetap bekerja atau mendapatkan pekerjaan baru. Ini terutama berlaku dalam industri yang terus berkembang atau berubah cepat, di mana pelatihan berkelanjutan sangat penting.

Tabel 1. 4 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2025 (Miliar Rupiah)

Provinsi	Investasi
Jakarta	69.766,05
Jawa Barat	68.541,79
Jawa Timur	36.044,78
Sulawesi Tengah	32.654,32
Banten	31.063,35
Maluku Utara	25.074,51
Jawa Tengah	21.848,73
Riau	21.630,66
Kalimantan Timur	19.820,59
Sumatera Utara	17.565,68

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, 2025

Berdasarkan tabel 1.4 provinsi jawa timur menduduki urutan ke 3 dengan nilai realisasi investasi sebesar 22.114,84 miliar rupiah. Posisi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan iklim investasi yang kondusif, didukung oleh infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi yang besar, dan ketersediaan tenaga kerja. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, realisasi investasi yang tinggi menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan lapangan kerja baru, baik secara langsung melalui kegiatan operasional Perusahaan.

Program pemagangan dalam negeri yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, serta mendukung lembaga pelatihan dalam menghasilkan lulusan yang profesional. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja, serta mendorong individu untuk berwirausaha dan membuka lapangan usaha sendiri.

Tabel 1.5 Jumlah Peserta Program Pemagangan Dalam Negeri Menurut Provinsi Di Pulau Jawa

Provinsi	2021	2022	2023
DKI Jakarta	170	200	152
Banten	200	280	223
Jawa Barat	300	250	222
Jawa Tengah	400	340	299
DI Yogyakarta	350	290	213
Jawa Timur	400	340	268

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas, 2025

Berdasarkan tabel 1.3 jumlah peserta yang mengikuti program pemagangan dalam negeri menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pemagangan dalam negeri di provinsi Jawa Timur dari tahun 2021 sampai 2023 relatif tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jumlah peserta dapat dijadikan indikator awal untuk mengevaluasi sejauh mana program ini mampu menjangkau tenaga kerja di wilayah tersebut. Semakin banyak peserta yang mengikuti program, semakin besar potensi program ini dalam meningkatkan kompetensi kerja.

Tabel 1.6 Jumlah Penempatan dari Program Pemagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur

Tahun	Jumlah Penempatan
2021	339
2022	264
2023	234

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, jumlah penyerapan tenaga kerja dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan. Penurunan penyerapan tenaga kerja dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam pengembangan kompetensi kerja yang dihasilkan oleh program pemagangan. Secara

ideal, program pemagangan bertujuan untuk mengasah keterampilan praktis dan pengetahuan peserta agar sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan program memiliki kompetensi yang relevan untuk masuk ke pasar kerja. Namun, jika penyerapan tenaga kerja menurun, hal ini dapat menunjukkan bahwa kompetensi yang dikembangkan melalui program pemagangan mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi dan kebutuhan industri yang terus berubah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui pengaruh program pemagangan dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu diambilah judul penelitian yaitu **“Analisis Pengaruh Program Pemagangan Dalam Negeri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh program pemagangan dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh program pemagangan dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur
- c. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis Penelitian ini akan menambah wawasan dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam kaitannya dengan program pemagangan dalam pengembangan kompetensi kerja. Hal ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana pemagangan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
- b. Penelitian ini mendukung teori ketenagakerjaan dan teori modal manusia yang menyatakan bahwa peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan seperti pemagangan dapat meningkatkan produktivitas individu dan peluang mereka di pasar kerja.
- c. Penelitian ini memberikan evaluasi langsung terhadap keberhasilan program pemagangan dalam negeri di Jawa Timur. Dengan mengetahui pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja.